

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Etnis

Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak reformasi di negeri ini digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhtar Haboddin yang mengatakan bahwa:¹

“Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara ‘kami’ dan ‘mereka’, ‘saya’ dan ‘kamu’ sampai pada bentuknya yang ekstrim ‘jawa’ dan ‘luar jawa’ atau ‘islam’ dan ‘kristen’. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang *notabene* ‘kaum pendatang’.”

Munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil *setting* politik etnisitas ini merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan

¹ Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, (Malang: Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya, 2007), hal. 111.

disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi.

1. Etnis Sebagai Identitas

Secara etimologis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak mau tahu dengan ideologi kelompok lain. Dalam perkembangannya makna *ethnos* berubah menjadi *ethnics* yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok “penyembah berhala” atau orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya sendiri tanpa peduli kelompok lain.²

Menurut Narroll yang dikutip Ali Liliweri kelompok etnis dikenal sebagai suatu populasi yang:³

1. Secara biologis mampu berkembang-biak dan bertahan
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam bentuk budaya
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan

² Liliweri, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

³ *Ibid.*, hal. 9.

4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Sedangkan Thomas Sowell yang menulis tentang *Ethnic of America* berpendapat bahwa:⁴

“Kelompok etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan lain-lain yang semuanya berpayung pada satu kelompok yang disebut kelompok etnis.”

Pendapat lain tentang etnis dikemukakan oleh Fredrick Barth dan Zatrow⁵ yang mengatakan bahwa etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya. Sementara Koentjaraningrat⁶ memaknai etnis sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian etnis oleh para ahli di atas, kemudian Joe R. Feagin mengatakan bahwa:⁷

“Kelompok etnis adalah sebuah kelompok sosial yang dapat dibedakan sebagian atau bahkan seluruhnya dengan orang lain atau dari kalangan mereka sendiri; yang pertama dan utama terletak pada kebudayaan dan karakteristik nasionalitas.”

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 10.

Senada dengan Feagin, Martin Bulmer pun mengemukakan:⁸

“Etnis atau yang selalu disebut kelompok etnis adalah suatu kelompok kolektif manusia dalam penduduk yang luas yang memiliki pernyataan atau ceritera asal-usul yang sama, mempunyai kenangan terhadap masa lalu yang terfokus pada suatu unsur simbolik atau lebih yang mendefinisikan identitas kelompok seperti kekerabatan, agama, bahasa, pembagian wilayah, tampilan nasionalitas dan fisik (suku bangsa dan fisik), yang anggotanya sadar bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok tersebut.”

Demikian pula UK-Learning⁹ mengemukakan bahwa batasan kelompok etnis selalu mengacu pada suatu karakteristik tertentu misalnya suatu kelompok yang selalu minoritas, suatu kelompok kecil, atau sekurang-kurangnya besaran kelompok tersebut yang lebih kecil dari kelompok dominan dalam masyarakat dimana mereka berada. Komposisi dari kelompok etnik ditentukan antara lain oleh perbedaan gaya hidup atau tingkat pendapatan, pendidikan, yang membedakan status antara individu baik dalam lingkungan etnik mereka sendiri maupun dengan etnis yang lain.

Diana¹⁰ mengemukakan bahwa etnis atau yang lazim disebut dengan kelompok etnis adalah kumpulan orang yang dapat dibedakan terutama oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa yang meliputi keunikan dalam perangai (*trait*) budayanya, perasaan sebagai suatu komunitas, mempunyai perasaan etnosentrisme, status keanggotaan yang bersifat keturunan atau *ascribed status*, dan berdiam atau memiliki teritorial tertentu.

Richard Delgado dan Jean Stefancik (2001) memperluas pengertian kelompok etnis sebagai kelompok sosial yang dapat tersusun atas ras, agama atau asal

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11.

negara. Dan pengertian ini dipertegas lagi oleh Glazer¹¹ yang memberikan definisi etnis yakni sebuah keluarga dengan identitas sosial yang jelas seperti kesamaan agama, kesamaan bahasa, kesamaan sejarah, pengalaman hidup, bahkan kesamaan mitos maupun mistis.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis adalah pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang paling penting para anggota dari kelompok etnis itu mempunyai perasaan sendiri yang secara tradisional berbeda dengan kelompok sosial lain.

Kedua, suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama. Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang kita sebut dengan *ethnic domain*. Susanne Langer¹² mengatakan bahwa kerap kali kelompok etnis itu mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk kesenian atau *art* yang sama, yang diciptakan dalam ruang dan waktu mereka.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lebih jauh mengenai hal ini Susanne Langer mengatakan ada semacam imajinasi yang sama atau arsitektur yang sama yang mereka ciptakan secara virtual. Dengan menciptakan arsitektur itu mereka menggambarkan diri mereka, hubungan mereka dengan orang lain, membentuk sistem peran, fungsi dan relasi, serta struktur dan sistem sosial. *Ibid.*, hal. 12.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa makna kelompok etnis mengandung dua hal utama yakni pengertian luas dan pengertian sempit. Pertama, pengertian luas berkaitan dengan kehadiran suatu kelompok tertentu yang terikat dengan karakteristik tertentu, dari fisik, sosial-budaya, sampai ideologi. Kedua, dalam arti sempit merujuk etnis pada kelompok suku bangsa karena alasan memiliki kebudayaan yang sama. Pengertian sempit etnis dikaitkan dengan suku bangsa. Istilah kelompok etnis merupakan konsep untuk menerangkan suatu kelompok, baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras yang sosial dianggap berada dan telah mengembangkan sub-kultur sendiri.

Para ilmuwan politik memandang konsepsi mengenai hakekat etnisitas dimaknai dua hal yakni pertama, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. Kedua, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indentifikasi diri dan askripsis sosial. Dua makna ini bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah (kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup suku, ras, nasionalitas dan kasta.

Pembahasan mengenai identitas etnis sebagai identitas diri seseorang merupakan sesuatu yang relevan dan benar di dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur. Hal ini dimungkinkan agar orang lain memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui asal-usul itulah setiap orang dapat

mendefinisikan tentang “Bagaimana saya berbeda dengan orang lain?” dan dari sinilah dapat diketahui “Apakah kita sama dengan orang lain?”. Dengan demikian keberadaan etnik maupun ras memberikan makna tentang keberadaan kita sebagai manusia yang nyata karena memiliki dan berada dalam konteks sejarah dan konteks sosial (etnis). Kita juga memiliki tipologi yang secara fisik berbeda dengan orang lain (*biological or natural category*) (Theodor W. Allen, 1993).¹³

Kita bisa mengidentifikasi suatu etnis sekurang-kurangnya melalui karakteristik budaya (sub-kultur). Misalnya ketika kita datang ke suatu negara, orang-orang dalam negara tersebut akan membedakan kita pendatang (*other*) dengan mereka (orang-orang) di negara itu sendiri. Bahkan di negara tersebut mereka juga membedakan diri mereka sebagai “penduduk asli” dengan “keturunan”. Jadi secara esensial orang-orang sadar akan adanya perbedaan identitas melalui pemahaman *self* dan *other*.

Mengenai konsep ini Charmen dan Champion mengatakan bahwa:¹⁴

“Identitas diri suatu etnis adalah integrasi dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam satu konsep diri. Harus diakui bahwa etnisitas juga merupakan salah satu akibat dari identitas diri yang mengalir dari nilai, tata cara, gaya, dan latar belakang individu seseorang. Identitas etnis tidak mengalir dari opini atau prasangka yang berkembang dalam suatu masyarakat luas. Identitas etnis dibangun dari dalam.”

Kemudian selanjutnya Champion justru menjadikan bahasa sebagai identitas utama suatu kelompok etnis. Menurutnya:¹⁵

“Saya perlu menggarisbawahi bahwa setiap orang mempunyai pengalaman perjuangan pribadi. Perjuangan pertama untuk mengetahui dan memahami bahasa ibunya. Kedua, perjuangan untuk mengetahui dan

¹³ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁵ *Ibid.*

memahami kompleksitas dunia dimana dia hidup, sehingga dia tahu tentang dirinya. Jika dia sudah tahu bahasa ibunya dan dunia tempat dia hidup dia akan tahu dirinya dan kebudayaannya.”

Kebenaran ungkapan Charman dan Champion tentang betapa pentingnya mengenal bahasa ibu dan dunia tempat dimana seseorang dibesarkan diperkuat oleh suatu penelitian Wi-vun Taiffalo Chiung dari *University Texas* di Arlington, sebuah tulisan berjudul *Language and Ethnic Identity in Taiwan*. Wu mengatakan bahwa:¹⁶

“Identitas etnis Orang Taiwan itu dapat ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan Orang Taiwan dalam berbahasa ibu. Ada perbedaan yang signifikan antara pola-pola relasi atas tiga karakteristik yakni penguasaan kosa kata bahasa ibu, kemampuan berbahasa ibu, dan merasakan bahwa bahasa ibu sebagai identitas mereka.”

Gambaran riset atas Orang Taiwan tersebut dialami pula oleh pelbagai suku bangsa kita di tanah air yang selalu berusaha menunjukkan identitas etnisnya. Seperti kata Moorad Mooradian¹⁷ yakni kita dapat mengatakan bahwa kita semua pasti merujukkan diri kita pada kelompok etnis sebagai identitas. Pernyataan Moorad tersebut memberikan penegasan bahwa setiap orang pasti akan mengatakan bahwa latar belakang etnis yang dimilikinya merupakan identitas dari mana orang tersebut berada dan berasal.

Refleksi mengenai pertanyaan keberadaan “saya” sebenarnya menunjukkan identitas kita. Identitas kita merupakan sebuah batas yang kuat untuk mengevaluasi kehadiran diri kita dengan orang lain. Identitas menunjukkan status keterkaitan individu dengan suatu kelompok darimana seseorang berafiliasi atau pernah berafiliasi. Pembahasan mengenai identitas etnis itu sangat tergantung

¹⁶ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 37.

sejauh mana saya merasa berada di dalam dan dengan etnis saya dan bukan karena evaluasi (opini) orang lain atas diri saya. Seperti yang diungkapkan Charles Taylor yang mengatakan bahwa:¹⁸

“Evaluasi atas etnis yang diajukan oleh orang lain umumnya mengandung dua jenis evaluasi yakni evaluasi yang lemah atau sederhana dan evaluasi yang kuat. Evaluasi yang lemah dan sederhana adalah memasukkan seseorang ke dalam sebuah kategori etnis tanpa membuat perbedaan kualitatif. Artinya membuat perbandingan yang tidak mendasar, perbandingan antara rasa suka diantara orang-orang. Sedangkan evaluasi yang kuat berdasarkan kualifikasi dengan analisis misalnya menentukan derajat, tinggi-rendah, baik dan buruk, dan lain-lain.”

Kemudian Marshall R. Singer dalam bukunya *Perception and Identity in Intercultural Communication* (1998) yang dikutip Gary Weaver, memfokuskan diri pada persepsi dan peran persepsi dalam kebudayaan dan komunikasi dengan menggunakan grafik kreatif yang menggambarkan tentang diri kita. Melalui analisis perbedaan perseptual Singer menguji bagaimana kebudayaan dan identitas kelompok sebenarnya dibentuk. Singer mengatakan:¹⁹

“Setiap orang adalah bagian dari beragam identitas kelompok yang berbeda secara simultan, dan dia harus belajar itu semua sehingga dia menjadi bagian dari kelompok tersebut. Oleh karena itu tidak seorang pun yang hanya merupakan bagian dari suatu kelompok yang sama; setiap orang akan memiliki peringkat sikap, nilai dan kepercayaan dari kelompok meskipun secara berbeda.”

Menurut Singer model konsep komunikasi yang tepat adalah bagaimana menerapkan komunikasi interpersonal, *intergroup*, dan *international contexts*, dan menganalisis masing-masing. Disini sebenarnya mau digambarkan bahwa *communication is at the heart of effective interaction* (komunikasi adalah hati dari interaksi yang efektif).

¹⁸ *Ibid.*, hal. 38.

¹⁹ *Ibid.*

Sementara menurut Susanne Langer mengatakan bahwa²⁰:

“Setiap etnis dan wilayahnya ditentukan oleh bagaimana etnis itu memiliki *feeling* dan *form* melalui simbol-simbol, dimana selalu dipertanyakan tipe-tipe tertentu dari seni seperti arsitektur yang tidak nyata namun virtual. Karena perluasan arsitektur khususnya dapat menciptakan gambaran tentang diri (*self*) dan relasi (*relation*) dengan orang lain untuk menggambarkan domain etnik, sistem fungsi relasi melalui tanda (*sign*) yang ikut membentuk perasaan (*the symbol of humanity to be found in the strength and interplay of form*).”

Untuk itu kemudian Moorad Mooradian²¹ memberikan kesimpulan bahwa kita semua dalam satu waktu yang sama, kalau bukan sekarang ini maka di waktu yang lain telah mendengar konsep identitas etnis. Ternyata identitas etnis merupakan kunci untuk membentuk identitas manusia sebagai pengembangan manusia.

Dalam praktik komunikasi antar etnis, identitas etnis sering memberikan makna tentang pribadi seseorang dan lebih jauh memberikan ciri khas sebuah kebudayaan yang melatarbelakangi orang itu. Karena dari ciri khas itulah kita mungkin dapat mengungkapkan keberadaan seseorang. Dalam hal ini Liliweri²² berpendapat bahwa pengertian identitas etnis pada tataran hubungan antar-manusia akan mengantarkan kita untuk memahami sesuatu yang lebih konseptual yakni bagaimana meletakkan seseorang ke tempat orang lain (komunikasi yang empati), atau sekurang-kurangnya berbagi (*share*) pikiran, perasaan, masalah, rasa simpatik (empati) dan lain-lain dalam sebuah proses komunikasi (antar-budaya).

²⁰ *Ibid.*, hal. 39.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 40.

Konsepsi di atas menjelaskan bahwa identitas orang lain berdasarkan peran mereka dalam suatu masyarakat. Dalam ranah sosiologi peran diartikan sebagai satu *set* harapan budaya terhadap sebuah posisi tertentu. Dalam hal ini Andreas Schneider mengatakan bahwa :²³

“Peran lebih mengacu pada harapan (*roles refer to expected*) dan tidak sekedar pada perilaku aktual, dan peran lebih bersifat normatif daripada sekedar deskriptif.”

Di sini terdapat perbedaan yang tegas antara hubungan peran sebagai sebuah identitas dengan struktur kebudayaan dan struktur sosial (identitas peran: struktur kebudayaan dan struktur sosial). Karena itu harus dibedakan antara peran yang diharapkan (*role expectation*) sebagai bagian dari struktur budaya suatu masyarakat dengan tampilan peran (*role performance*) yang merupakan bagian dari struktur sosial suatu masyarakat. Yang dimaksud struktur budaya adalah pola-pola persepsi, berpikir dan perasaan, sedangkan struktur sosial adalah pola-pola perilaku sosial. Dengan demikian secara sosiologis dapat diasumsikan bahwa jika posisi sosial seseorang berkaitan erat dengan peranannya dalam struktur budaya maupun struktur sosial, hal ini akan mengarah kepada identitas peran. Berkaitan dengan hal ini, Stryker²⁴ berpendapat bahwa dalam pandangan psikologi sosial, ketika posisi sosial telah terinternalisasi, maka kita akan bicara tentang identitas itu sendiri.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 41.

2. Representasi Identitas Etnis dalam Politik

Pemikiran dan pembahasan mengenai istilah politik identitas menjadi salah satu topik besar yang sering diperbincangkan oleh para pakar ilmu sosial dan politik dalam perkembangan politik dewasa ini. Telah banyak para pakar yang memberikan definisi tentang politik identitas terutama setelah menguatnya isu ini dalam agenda suksesi kepemimpinan beberapa tahun terakhir. Kata “identitas” dan maknanya di dalam konteks politik sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang cukup baru di dalam wacana intelektual kontemporer. Konsep mengenai identitas ini sendiri semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan untuk menjadi kajian khusus dalam ilmu sosial dan politik seiring dengan semakin menguatnya segmentasi sosial dalam masyarakat. Lebih jauh pembedaan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut erat kaitannya dengan metamorfosa demokrasi yang esensinya bersinggungan dengan agenda-agenda politik.

Euforia perayaan demokrasi ternyata telah melahirkan problematika tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Demokrasi yang belum matang secara potensial membawa resiko di dalam relasi vertikal antara negara dan rakyatnya (*state-citizens*) maupun resiko sosial lainnya yang bersifat horisontal seperti misalnya konflik antaranggota masyarakat. Resiko sosial baik secara vertikal maupun horisontal ini ditandai dengan adanya tuntutan untuk mendapatkan ruang politik yang lebih luas bagi praktek-praktek multikulturalisme. Praktek multikulturalisme ini pun telah melahirkan resiko-resiko sosial lainnya seperti potensi konflik dalam kemunculan politik etnisitas, hegemoni budaya kelompok mayoritas atau

sebaliknya dan resiko-resiko lainnya. Fenomena politik semacam ini merupakan wujud dari politik representasi. Seperti yang diungkapkan Ari Setyaningrum yang mengatakan bahwa:²⁵

“Politik representasi merupakan kontruksi politik yang memungkinkan sekelompok orang mengidentifikasi diri mereka secara simbolik sebagai bagian dari suatu kolektivitas tertentu dimana praktek dalam proses identifikasi itu dimobilisasikan untuk tujuan-tujuan politik”.

Gagasan Ari Setyaningrum terkait dengan politik representasi tersebut mempertegas konsepsi tentang politik identitas itu sendiri. Menurutnya politik representasi itu lahir dari adanya penggunaan simbol-simbol oleh sekelompok orang untuk memunculkan suatu identitas diri, dimana identitas tersebut telah mewakili dirinya dan merepresentasikan bahwa identitas tersebut merupakan bagian dari suatu kolektivitas atau kelompok.

Berkaitan dengan hal ini Stuart Hall memberikan pemikirannya mengenai politik representasi. Hall berpendapat bahwa:²⁶

“Konsep representasi ini dipahami sebagai suatu rekayasa konstruksi sosial yang dimungkinkan melalui bekerjanya sirkuit kebudayaan dalam melahirkan produksi dan reproduksi makna atau pencitraan yang mampu menciptakan suatu opini publik atau menentukan posisi subyektivitas seseorang di dalam ruang dan relasi sosialnya.”

Disini Hall menjelaskan bagaimana proses identitas itu terbentuk. Menurutnya sirkuit kebudayaan (yang dalam hal ini dipahami sebagai unsur yang memberikan ciri dan karakter budaya itu sendiri) akan dapat memberikan makna sebagai citra seseorang yang mampu memberikan dan menguasai pemahaman publik sehingga dapat diketahui dari kelompok sosial mana seseorang berada.

²⁵ Mandatory, *Politik Perlawanan*, (Yogyakarta: IRE, 2005), hal. 14.

²⁶ *Ibid.*

Beberapa literatur baik politik maupun sosiologi membahas mengenai identitas dalam masyarakat. Identitas itu sendiri dapat dikategorikan dalam dunia kategori utama yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan-*citizenship*). Mengenai pengertian identitas itu sendiri Ari Setyaningrum memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa:²⁷

“Identitas sosial menentukan posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subyek yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*). Dikarenakan identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai perbedaan (*difference*).”

Pendapat Ari di atas menjelaskan bahwa identitas sosial dalam masyarakat itu menentukan bagian seseorang berdasarkan hubungannya dan interaksinya dalam masyarakat. Sedangkan identitas politik menentukan seseorang di dalam bagian kelompok yang berdasarkan perasaan yang sama dan saling memiliki sekaligus memberikan batasan kepada bagian kelompok lain terhadap suatu yang berbeda. Hal ini menjadikan konsep identitas berkaitan dengan konsep perbedaan.

Selanjutnya, mengenai identitas politik Stuart Hall berpendapat bahwa:²⁸

“Identitas seseorang mengkonstruksikan suatu proses dialogis yang menandai batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain.”

Selaras dengan konsepsi identitas yang dikemukakan oleh Ari Setyaningrum, Hall mengkonsepsikan dalam sudut pandang yang tidak jauh berbeda. Namun Hall

²⁷ *Ibid.*, hal 18.

²⁸ *Ibid.*, hal 26.

mempunyai pandangan bahwa identitas seseorang terbangun melalui proses dialogis dengan membatasi seseorang melalui kategori tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan diri kita serta memberikan pembedaan terhadap apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain.

Dari pernyataan di atas menurut Hall identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari “*sense* (rasa/kesadaran) terhadap kolektivitas”. Jadi ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan dengan orang lain maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*).

Menanggapi pernyataan ini kemudian Judith Butler memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa:²⁹

“Konstruksi mengenai identitas melibatkan seluruh peluang-peluang dari berbagai kategori pembedaan kolektif yang saling berkompetisi dan karena itu kategori-kategori identitas tidaklah bersifat deskriptif melainkan bersifat normatif.”

Pendapat Butler di atas dapat dimaknai bahwa suatu identitas itu muncul dan terbangun melalui akumulasi atau sekumpulan dari berbagai kolektivitas kategori pembeda, dimana setiap kategori pembeda tersebut saling bersaing yang kemudian membuat kategori pembeda tersebut tidak bersifat deskriptif melainkan bersifat normatif.

²⁹ *Ibid.*, hal 27.

Pengenaan identitas kolektif sebagai sumberdaya sekaligus sarana politik di dalam realitas modern, secara sederhana kita temukan di dalam fenomena terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*) dalam era poskolonial, dimana beragam latar belakang komunitas ras, suku-bangsa (etnis), agama membentuk komunitas negara-bangsa. Konsep ini yang kemudian di kemukakan oleh Benedict Anderson³⁰ yang berpendapat bahwa ikatan-ikatan kolektif dalam suatu komunitas politik bukan hanya suatu konstruksi politik semata melainkan juga sebagai konstruksi budaya.

Anderson lebih menitikberatkan identitas mengarah kepada asal mula terbentuknya suatu bangsa. Karena menurutnya ikatan-ikatan kolektif atas kesamaan rasa dalam politik bukan hanya menjadi konstruksi politik semata melainkan juga sebagai bangunan konsep budaya dalam masyarakat. Disini ikatan terhadap kolektifitas bukan lagi didasari oleh kontak-kontak langsung secara fisik sebagaimana yang membuat kita terikat dengan komunitas di lingkungan sekitar atau di dalam suatu organisasi. Melainkan juga terbentuk oleh makna melalui simbol-simbol dan praktek-praktek budaya yang saling dibagi bersama. Seperti penulisan sejarah, lagu-lagu kebangsaan, bendera, atau pengakuan bagi hari-hari besar nasional.

Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (*politics of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik

³⁰ *Ibid.*, hal. 14.

pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber daya dan sarana politik.³¹ Dalam hal ini jelas bahwa makna dari identitas politik itu berbeda dengan konsep politik identitas.

Ari lebih menitikberatkan politik identitas sebagai suatu cara atau proses mendesain sebuah politik yang berdasarkan kekuatan dan sumberdaya dalam mengorganisasikan identitas, baik itu identitas politik itu sendiri maupun identitas sosial. Proses pengorganisasian itu esensinya adalah bagaimana pembagian kelompok-kelompok bertumpukan rasa kepemilikan atas kesamaan dan batasan-batasan dalam melakukan pembedaan.

Dalam konteks dimana identitas dimobilisasi dalam artikulasi kepentingan tersedia peluang-peluang bagi munculnya klaim-klaim dari masyarakat terhadap identitas sosial-politik baru yang secara politis memunculkan kondisi yang dilematis dari perkembangan masyarakat kontemporer. Situasi semacam inilah yang membuat kita perlu merefleksikan kembali kaitan antara identitas sosial dan identitas politik yang secara dinamis dapat mempengaruhi upaya-upaya dalam mengartikulasikan kepentingan politik sekelompok orang. Sehingga pengkategorian identitas tidak dapat lagi secara sederhana kita pahami sebatas polarisasi identitas sosial atau politik. Hal ini dikarenakan identitas sosial atau budaya seseorang, misalnya yang didasari oleh sistem kelas (bawah, menengah, atas), seksualitas (heteroseksual, homoseksual), agama (Islam, Kristen, dan lain-lain) merupakan sumber bagi pembentukan identitas politik dan karenanya sangat signifikan bagi mobilisasi politik identitas.

³¹ Haboddin. *Op.Cit.*, hal. 119.

3. Makna Identitas Politik Bagi Posisi Subyek (Konstituen)

Pembahasan mengenai makna identitas politik bagi posisi subyektif seseorang dalam politik ini diawali dengan pertanyaan apakah identitas etnis mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku etnis? Atau apakah pikiran, perasaan dan perilaku etnis dapat menggambarkan identitas etnis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipaparkan mengenai hasil berbagai riset yang dilakukan oleh para ahli. Ternyata dari hasil riset tersebut diketahui bahwa identitas seseorang akan sangat berdampak terhadap cara berpikir, perasaan dan perilakunya.

Mandla Keyse dari ASUCLA *Communications Board* dalam tulisannya "*Ethnic Groups Must Come Together to Produce Social Change*" mengemukakan bahwa:³²

“Sebagian besar perilaku yang terlihat dapat menggambarkan secara transendental identitas etnis dan ras yang bertumbuh dan terus berubah karena telah terjadi komunikasi antar personal yang lintas dan antar budaya, yang membentuk sebuah masyarakat multietnis.”

Keyse menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu secara tidak langsung dapat menggambarkan identitas etnis yang dimiliki oleh orang tersebut. Dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh karakter etnis yang mengalami perubahan akibat adanya interaksi sosial melalui komunikasi antar personal maupun antar budaya sehingga terbentuklah masyarakat yang multietnis.

Menanggapi pendapat Keyse di atas, Raymond Buriel melalui risetnya yang berjudul "*Childbearing Orientations in Mexican American Families: the Influence*

³² Liliweri, *Op.Cit.*, hal. 47.

of *Generation and Sociocultural Factors*” yang dimuat dalam *Journal of Marriage and the Family* 55, 987-1000 mengatakan bahwa:³³

“Imigrasi dan akulturasi berdampak terhadap keluarga-keluarga kelahiran Amerika-Meksiko. Sebagian besar orang tua dari generasi pertama dan kedua ternyata selalu memamerkan orientasi dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua Meksiko. Sedangkan generasi ketiga lebih peduli pada orientasi status orang tua mereka yang terakhir. Artinya tidak terlalu peduli pada faktor kelahiran Amerika-Meksiko. Apalagi kalangan generasi ketiga dalam mengayuh kehidupannya lebih merasa otonom, bergaul dengan kekerasan hidup di perkotaan dan selalu bersikap permisif dalam kehidupan sosial.”

Raymond menjelaskan bahwa identitas itu menggambarkan perilaku hidup seseorang. Dari riset tersebut terlihat jelas bahwa orang-orang yang terlahir sebagai Amerika-Meksiko ternyata orang tua mereka selalu memperlihatkan identitasnya kepada keturunannya bahwa dirinya adalah Meksiko. Selanjutnya R. Buriel (dkk) dalam artikelnya yang berjudul “*The Relationship of Language Brokering to Academic Performance, Biculturalism, and Self-efficacy among Latino Adolescents*” mengemukakan bahwa:³⁴

“Ada korelasi positif antara bilingual dengan tampilan diri mereka. Pengetahuan (kognitif) seseorang sangat ditentukan bahasa yang mereka gunakan, dan manfaat bilingual itu ternyata sangat mendukung kemampuan sosial mereka dalam masyarakatnya.”

Buriel dalam riset tersebut lebih mengkaji perilaku seseorang dari faktor bahasa yang menjadi identitas seseorang. Menurut hasil riset tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara bahasa yang digunakan oleh seseorang dengan penampilan dalam diri seseorang. Secara tidak langsung kemampuan berkomunikasi dengan dua bahasa itu dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Bahasa dapat menentukan pengetahuan (kognitif) seseorang dan orang

³³ *Ibid.*, hal 44.

³⁴ *Ibid.*

yang mampu berkomunikasi dengan dua bahasa memiliki kemampuan bersosial dalam masyarakatnya lebih baik. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan rasionalitas mereka dalam relasi sosialnya di masyarakat.

Senada dengan pendapat Buriel, kajian yang sama mengenai perilaku dari faktor bahasa juga dijelaskan oleh Carol Goodenow dan Olivia M. Espin dalam penelitian mereka berjudul "*Identity Choices in Immigrant Adolescent Females*" menunjukkan bahwa lima remaja putri dari sekolah tinggi di tempat urban yang menggunakan dua bahasa mampu mengungkapkan identitas personal mereka. Ini juga menunjukkan bahwa otonomi para mahasiswa sebagai orang bebas dan terdidik yang kemudian memasuki sekolah multikultural memiliki sikap toleransi yang jauh lebih besar dari pada para mahasiswa urban yang hanya memiliki satu bahasa saja.³⁵

Carol Goodenow berpendapat jika seseorang yang mampu berkomunikasi dengan dua bahasa di daerah yang mayoritas berpenduduk pendatang, artinya memiliki kemampuan berinteraksi dengan kelompok (etnis) lain yang berbeda mampu memperlihatkan identitasnya. Dengan adanya kebebasan untuk bersosialisasi ketika berada di tempat yang multikultural mereka memiliki sikap toleransi yang jauh lebih besar dari pada seseorang yang hanya mampu berkomunikasi dengan satu bahasa saja. Ini membuktikan bahwa faktor bahasa sebagai identitas seseorang dapat membentuk sikap atau perilaku yang positif dan lebih rasional.

³⁵ *Ibid.*, hal. 46.

Kemudian M. Calderone melalui tulisannya “*Adolescent Sons and Daughters of Immigrant: How Schools Can Respond*” dalam K. Berman dan B. Schneider mengatakan bahwa:³⁶

“Ada hubungan antara situasi sosial yang dihadapi seseorang imigran dengan tantangan mereka dibidang pendidikan. Artinya latar belakang seseorang yang berbeda dalam status sosial ekonomi dari negeri asal mereka sangat mempengaruhi keberhasilan studi. Keberhasilan studi itu berkaitan erat dengan pengakuan identitas asal-usul. Hal ini karena upaya seseorang dalam mengetahui kebudayaan asal sangat mempengaruhi aktivitas seseorang, termasuk dalam ranah akademis.”

Senada dengan Calderone, Sandra Champion dalam “*The Adolescent Quest for Meaning through Multicultural Reading: A Case Study, Library Trends*” mengatakan bahwa:³⁷

“Pada umumnya remaja imigran yang sukses disebabkan karena mereka selalu menyelidiki riwayat asal-usul mereka, terutama cerita-cerita heroik atau cerita kepahlawanan suku bangsa mereka. Disamping cerita epos kepahlawanan faktor pengetahuan tentang seni dan bahasa merupakan faktor pendorong untuk mengenal asal-usul.”

Calderon dan Champion menegaskan bahwa latar belakang atau asal-usul itu mempengaruhi keberhasilan seseorang. Karena pada dasarnya keberhasilan itu ditentukan oleh pengenalan terhadap identitas asal-usul kita. Seseorang yang memahami budaya, asal-usul atau pun riwayat sejarah sangat mempengaruhi aktivitasnya dan berpengaruh terhadap pikirannya (cara berpikir).

Richard L. Dukes dan Ruben O. Martinez dalam “*The Effect of Ethnic Identity, Ethnicity, and Gender on Adolescent Well-being*” (*Journal of Youth and Adolescent*) menegaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga kategori identitas etnis yang perlu dipelajari jika setiap orang ingin mempertahankan identitas

³⁶ *Ibid.*, hal. 45.

³⁷ *Ibid.*

etnisnya. Tiga kategori yang harus dipelajari itu yakni kepuasan dalam relasi gender, kepuasan diri atau *self-esteem*, tujuan dalam hidup dan kepercayaan diri. Karena kemauan dan kemampuan belajar tentang identitas itulah prestasi akademik para siswa jauh lebih baik.³⁸

Selanjutnya T. Lafromboise (dkk) mengemukakan bahwa:³⁹

“Aspek psikologis ternyata dipengaruhi oleh status dua budaya dari para remaja dan pemuda. Kultur seperti asimilasi antar-budaya, akulturasi dan alterasi dapat mendorong kesadaran multikultur. Dan hal ini sangat bergantung pada derajat kontak, loyalitas, dan keterlibatan individu dalam budaya lama/asli dengan budaya baru. Jadi kemampuan untuk mengakuisisi pengetahuan ke dalam dua budaya sangat menentukan identitas diri.

Lafromboise berkesimpulan bahwa psikologis dipengaruhi oleh pertukaran dan percampuran dua budaya yang secara langsung berimplikasi terhadap kesadaran untuk bertenggang rasa dalam keberbedaan dan heterogenitas. Dan hal ini bergantung pada intensitas interaksi dan loyalitas keterlibatan seseorang dalam busaya asli dengan budaya baru. Kemampuan dalam mengakuisisi pengetahuan dalam dua budaya itu menentukan identitas diri.

J.S. Phinney dalam *Ethnic Identity in Adolescent and Adult: Review of the Litterature (Psychological Bulletin 108 (3), 499-514)* mengartikan bahwa identitas etnis sangat tergantung dari perspektif sosial atas ruang dan waktu. Misalnya akulturasi sering diartikan sebagai proses marjinalisasi, dan asimilasi selalu diartikan sebagai separasi. Oleh karena itu identitas etnis di kalangan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 46.

remaja maupun pemuda telah mengalami keterasingan dari identitas etnis asalnya.⁴⁰

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa identitas etnis itu dapat mempengaruhi pikiran perasaan dan perilaku seseorang. Pertama, perilaku tersebut dipengaruhi oleh karakter etnis yang mengalami perubahan akibat adanya interaksi sosial melalui komunikasi antar personal maupun antar budaya sehingga terbentuklah masyarakat yang multietnis. Kedua, Melalui bahasa yang menjadi identitas seseorang, dapat diketahui terdapat hubungan yang positif antara bahasa yang digunakan oleh seseorang dengan penampilan dalam diri seseorang. Bahasa dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Bahasa menentukan pengetahuan (kognitif) seseorang. Seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik maka kemampuan bersosial dalam masyarakatnya juga lebih baik. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan rasionalitas mereka dalam relasi sosialnya di masyarakat. Faktor bahasa sebagai identitas seseorang dapat membentuk sikap atau perilaku yang positif dan lebih rasional.

Ketiga, faktor latar belakang atau asal-usul sebagai identitas itu juga mempengaruhi perilaku hidup seseorang. kemampuan dalam memahami latar belakang atau asal-usul dapat menentukan keberhasilan seseorang. Karena pada dasarnya keberhasilan itu ditentukan oleh pengenalan terhadap identitas asal-usul kita. Seseorang yang memahami budaya, asal-usul atau pun riwayat sejarah sangat mempengaruhi aktivitasnya dan berpengaruh terhadap pikirannya (cara berpikir).

⁴⁰ *Ibid.*

Setiap manusia tentunya memiliki perilaku atau menampilkan perilaku dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Ini akibat adanya respon terhadap lingkungan tempatnya berada atau terhadap pelaksanaan seperangkat nilai yang diyakini dan dipahami sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perilaku sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁴¹

Respon atau tindakan yang dilakukan itu memiliki suatu tujuan sebagaimana yang diungkap oleh Rogers dan Shoemakers yang dikutip Imas Tutiah (1999:15) bahwa perilaku pada sendirinya terarah pada tujuan yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhannya sebagaimana dihayati dalam dunianya yaitu dunia penghayatan. Menurut T. Parson dalam Soekanto salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat yaitu :⁴²

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
2. Terjadi pada situasi tertentu
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu

Jadi secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku adalah tindakan atau respon yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu hal dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini perilaku yang dimaksud adalah

⁴¹ Tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 755.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 15.

perilaku yang berkaitan dengan persoalan politik sehingga mengarah pada tujuan-tujuan politik. Mengenai hal ini Sudijono Sastroatmodjo mengatakan bahwa:⁴³

“Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Seiring dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan: (1) Tujuan suatu masyarakat, (2) Kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, (3) Sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tersebut.”

Sementara menurut Jack C. Plano (1985:161) perilaku politik adalah:⁴⁴

“Pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah:

1. Tanggapan-tanggapan yang internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan)
2. Tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi).

Dalam arti luas perilaku “yang bersifat politik” bisa ditemui dalam setiap lingkup kelembagaan.”

Secara lebih spesifik Ramlan Surbakti mengatakan:⁴⁵

“Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses dan pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.”

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa yang selalu melakukan kegiatan politik ialah pemerintah (lembaga dan peranannya) dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Oleh karena itu perilaku politik dibagi dua yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok). Kegiatan-kegiatan politik itu yang pertama bertanggungjawab membuat, melaksanakan, dan

⁴³ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hal. 7.

⁴⁴ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 161.

⁴⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 16.

menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua tidak berwenang seperti yang pertama tetapi berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku politik adalah suatu tanggapan baik berupa pikiran, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, para pejabat pemerintah maupun warga negara biasa dalam rangka membuat, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan yang menyangkut persoalan politik. Dari pemahaman tersebut maka yang dimaksud perilaku politik dalam penelitian ini adalah perilaku yang dilakukan oleh individu masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam menentukan preferensi politiknya pada Pilkada Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

Menurut Ramlan Surbakti⁴⁶ dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Lebih lanjut Ramlan Surbakti dengan jelas mengatakan, adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik, aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Pengertian agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 132.

Sementa Jack Plano memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan aktor politik adalah:⁴⁷

“Individu atau kelompok sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam sistem politik. Seperti dalam panggung sandiwara pelaku politik memainkan satu peranan di dalam politik. Walaupun tindakan ini hanya dilaksanakan oleh manusia, namun dalam analisa politik kecakapan bertindak selalu dikaitkan dengan satuan-satuan yang berhubungan dengan hukum seperti negara. Perilaku politik para aktor bisa digambarkan, dianalisa, dijelaskan dan diramalkan dalam semua tingkatan sistem politik - lokal, daerah, nasional atau pun internasional sehingga ada berbagai jenis pelaku seperti negara, pengambil keputusan puncak, parlemen nasional atau badan administrasi.”

Dalam penelitian ini unit analisis yang dikaji adalah aktor politik. Aktor politik yang dimaksud adalah individu aktor politik yakni warga negara biasa, dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam menentukan preferensi politiknya pada Pilkada Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Pembahasan mengenai preferensi politik berkaitan erat dengan perilaku memilih. Apabila kita ingin mengkaji tentang perilaku memilih maka diawali dengan terlebih dahulu mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pemilih. Menurut Firmansyah pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.⁴⁸

⁴⁷ Plano. *Op.cit.*, hal. 158.

⁴⁸ Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 480.

Sementara perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah:⁴⁹

“Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.”

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa perilaku memilih dikonsepsikan sebagai tindakan seseorang dalam mengambil keputusan pemberian suara untuk memilih atau tidak memilih pada pelaksanaan pemilu, dimana tindakannya tersebut menggambarkan sikapnya untuk mendukung atau tidak mendukung kandidat tertentu. Perilaku pemilih itu ditentukan oleh berbagai macam faktor determinan dalam menentukan pilihan politiknya. Preferensi pemilih seringkali terbentuk oleh lebih dari satu faktor yang satu sama lain saling meneguhkan. Kombinasi beberapa faktor tersebut memberikan pertimbangan pemilih dan membentuk sebuah citra tertentu dalam benak pemilih. Dalam hal ini Ramlan Surbakti memberikan pandangannya bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, domain kognitif tersebut yaitu:⁵⁰

1. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), mempresentasikan kebijakan/program (*platform*) yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
2. Citra sosial (*social imagery*) menunjukkan sikap stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor antara lain demografi, sosial ekonomi, kultur dan etnik, serta politis-ideologis
3. Perasaan emosional (*emosional feelings*) adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
4. Citra kandidat (*candidate personality*) mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
5. Peristiwa mutakhir (*currents events*) mengacu pada peristiwa, isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 480-481.

6. Peristiwa personal (personal events), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezin tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang dan sebagainya.
7. Faktor-faktor epidemik (epidemic issues) adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Dalam pembahasan perilaku pemilih, menurut Dieter Roth (2009) menyebutkan bahwa:⁵¹

“Apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak hanya ada satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya.”

Dieter menjelaskan bahwa perilaku pemilih tidak bisa dijelaskan melalui satu teori yang pasti, ini disebabkan karena ada berbagai faktor dan domain yang turut menentukan pilihan politik seseorang. Disamping itu juga perilaku manusia yang sangat kompleks sehingga banyak kajian teori yang membahas tentang perilaku manusia. Hal ini membuat perilaku pemilih pun juga membutuhkan kajian dari berbagai teori yang ada. Menanggapi hal ini ilmuwan Dennis Kavanagh melalui teorinya mengungkapkan bahwa ada lima pendekatan untuk menganalisis tingkah laku massa dalam pemilih dalam suatu pemilu. Kelima pendekatan itu meliputi pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologis sosial, dan pendekatan rasional.⁵²

Namun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan salah satu pendekatan perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis. Penggunaan pendekatan sosiologis ini didasarkan atas penelitian yang memfokuskan pada faktor etnisitas yang direpresentasikan sebagai identitas seorang kandidat. Bagaimana etnis yang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 482.

⁵² *Ibid.*

direpresentasikan sebagai identitas dalam politik tersebut dapat menentukan preferensi politik seseorang.

Pendekatan sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilih secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan penjelasan model makrososiologis. Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg Simmel (1980). Menurut teori ini setiap manusia terikat di dalam beberapa lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya.⁵³

Kemudian Paul F. Lazarsfeld mengadopsi teori ini untuk menganalisisnya terhadap pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu, yakni status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaan dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Menurut Lazarsfeld pemberian suara dalam pemilu pada dasarnya adalah suatu pengalaman kelompok. Perubahan perilaku pemilu seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosial individu tersebut. Pengaruh terbesar berasal dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat erat individu terkait. Pendapat ini didukung oleh Dieter Roth berpendapat bahwa perilaku pemilu

⁵³ *Ibid.*, hal. 493.

seseorang dalam pemilu cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada.⁵⁴

Sementara bagi Nimmo⁵⁵ pendekatan sosiologis menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok. Selain itu pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, maupun kelompok-kelompok okupasi serta pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku memilih seseorang.

Deans Jaros dkk, ketika mencoba menghubungkan antara keanggotaan dalam suatu kelompok perilaku politik seseorang, menyederhanakan pengelompokan sosial tersebut ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok primer, kelompok skunder dan kelompok kategori:⁵⁶

a. Kelompok Kategorial

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut :

- 1) Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena dalam kultur Indonesia umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 496.

- 2) Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit-getir mempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
- 3) Peran-peran sosial misalnya masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan.

b. Kelompok Sekunder

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kelompok sekunder memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan kelompok kategorial. Kekuatan pengaruh kelompok sekunder kepada para anggotanya tergantung dari empat faktor psikologis yaitu :

- 1) Kuat-lemahnya identifikasi individual terhadap kelompok. Jika identifikasi seseorang dengan kelompoknya kuat, maka pengaruh kelompok terhadap individu tersebut akan kuat pula.
- 2) Berkaitan dengan lamanya seseorang menjadi anggota kelompok. Semakin lama menjadi anggota kelompok tersebut, kian kuat keterlibatan psikologis yang bersangkutan dengan kelompok tersebut.
- 3) Penguatan politik bagi para pemimpin suatu kelompok. Semakin penting makna politik maka semakin kuat para pemimpin tersebut mendesak tindakan politik tertentu untuk meningkatkan loyalitas kelompok.
- 4) Tingkat kepentingan politik bagi anggota-anggota individual

Kelompok sekunder dapat diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan, status socio-ekonomi dan kelas sosial, dan kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama dan daerah.

c. Kelompok Primer

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik

seseorang khususnya dari keluarga dan teman-teman dekat. Mereka yang termasuk dalam kelompok primer adalah pasangan-pasangan suami istri, orang tua beserta anak-anaknya, dan kelompok-kelompok bermain (*peer groups*).

Selain faktor-faktor di atas, aspek geografis juga mempunyai hubungan dengan perilaku pemilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan terhadap parpol. Pern Arnt Peterson dan Lawrence E. Rose mengatakan bahwa ikatan-ikatan kedaerahan terutama sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang terhadap kandidat. Kemudian Patoski berpendapat bahwa suatu aksioma politik jika para kandidat cenderung lebih baik memilih di sekitar rumahnya daripada mereka harus melakukannya di tempat lain. Sementara Key (1949) dalam tulisan klasiknya "*Southern Politics*" mengatakan perilaku pemilih semacam ini disebut *localism* (kedaerahan) atau perilaku memilih *Friend and Neighbors* (teman dan tetangga).⁵⁷

Selanjutnya model penjelasan makrososiologis yang dikembangkan oleh Lipset dan Rokkan, penjelasan ini mengacu kepada konflik-konflik mendasar yang biasa muncul di masyarakat, yang kesetimbangannya perlu dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Model ini mengacu pada klasifikasi sistem sosial dari Talcott Parson. Dalam teorinya Parson mengatakan bahwa:⁵⁸

“Sistem-sistem kemasyarakatan memiliki dimensi fungsional dan teritorial, hal mana dapat ditampilkan dalam bentuk skema dengan empat medan dan poros. Para poros teritorial negara (pusat) diperhadapkan dengan daerah (bidang pinggiran/perifer). Poros fungsional dibentuk oleh ekonomi di satu sisi dan ideologi di sisi lain.”

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 497.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 498.

Seperti yang dikemukakan Stein Rokkan (1980), Parson mengatakan bahwa pengenalan pertama yang penting adalah fakta bahwa perpecahan/perpisahan mendasar yang dapat ditemukan di segenap lapisan masyarakat Eropa menyediakan dasar bagi pembentukan sistem partai nasional dengan cara dan kombinasi yang berbeda-beda. Karenanya diusahakan untuk menemukan suatu model yang berlaku umum yang memungkinkan adanya transisi dari struktur pemisahan atas sistem partai-partai sampai kepada pembagian perilaku individual.

Empat macam pemisahan mendasar (yang selanjutnya disebut *cleavages* atau garis konflik) yakni dua *cleavage* dominan di bidang budaya/ideologi dan dua lainnya dominan di bidang ekonomi. Kesemuanya merupakan pernyataan protes terhadap elit nasional yang telah memiliki kedudukan yang mapan beserta hegemoni budaya mereka. *Cleavages* ini sekaligus mewakili gelombang emansipasi dan mobilisasi yang meluas. Di sini terdapat tendensi bahwa di masing-masing dua sisi skema dengan empat medan terlihat pemisahan menuju pusat poros teritorial, pemisahan lainnya menuju daerah perifer. Empat konflik utama menurut Stein Rokkan tersebut adalah :⁵⁹

- a. Konflik antara kelompok elit pusat yang berkuasa dan kelompok masyarakat di daerah yang tergantung secara etnis, bahasa dan keagamaan.
- b. Konflik antara tuntutan atas kekuasaan sekuler negara dan *privilege* Gereja yang diperoleh secara historis.
- c. Konflik antara kepentingan agraris dan industri komersial
- d. Konflik antara kelompok masyarakat berada dan kaum pekerja.

Kemudian Weber mendefinisikan kelas dan mengatakan konflik di sisi ekonomi pada poros fungsional dapat didefinisikan sebagai konflik kelas pekerja. Konflik

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 499.

ini terjadi antara pengusaha dan kelompok yang tergantung pada pemberi kerja atau konflik kelas pemilik yaitu antara sektor primer dan sekunder.

B. Politik Etnis dalam Pilkada

Menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor politik baik lokal maupun nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan. Hal ini seiring dengan semakin dipangkasnya kekuasaan sentralisasi. Bangsa ini pun kembali tersentak dengan munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil *setting* politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Gerakan politik identitas ini semakin banyak digunakan oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan segmentasi kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi.

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik (pilkada) sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Seperti yang ditafsirkan oleh ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas yaitu Agnes Heller yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998) pakar politik dari Universitas Duke mendefinisikan:⁶⁰

⁶⁰ Haboddin. *Op.Cit.*, hal. 112.

“Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.”

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik keberbedaan. Mereka menjelaskan bahwa politik identitas adalah suatu mekanisme dalam politik yang memberikan batas-batas dalam kategori pembeda bagi mereka yang tidak memiliki rasa persamaan dengan kita yang kemudian ditunjukkan melalui dipilih dan tidak dipilih.

Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di selenggarakan di Winapada 1994. Pertemuan di Wina tersebut melahirkan dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa:⁶¹

“Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.”

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa dalam politik identitas tentu saja ikatan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 113.

kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Politik identitas yang dilakukan oleh para elit lokal ternyata dikemas dalam bentuk yang variatif, rapi dan elegan meskipun konsepsinya telah menciderai nilai demokrasi.⁶² Pertama, politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indoensia, tidak luput juga di Provinsi Lampung. Kedua, politik identitas yang dicoba untuk ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak. Atau dalam istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambil alih seluruh bangunan institusi politik lokal. Praktik semacam ini yang diterjemahkan oleh masyarakat sebagai nepotisme yang mengakibatkan kecemburuan masyarakat begitu tajam dalam tubuh birokrasi.

Ketiga, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara “kami dan mereka”, “saya dan kamu” sampai pada bentuknya yang ekstrim “jawa’ dan “luar jawa”, hingga “islam dan kristen”. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh atau pun rival

⁶² *Ibid*, hal. 110-111

politiknya yang *notabene* “kaum pendatang”. Keempat, politik identitas dimobilisir untuk mendapat simpatik pemerintah yang lebih di atasnya. Politisasi identitas di ranah lokal sebagaimana digambarkan di atas merupakan realitas politik yang telah mengakar dan menggurita dan konsekuensi negatif yang harus diterima dari adanya kebijakan desentralisasi.

Dalam *setting* penelitian ini lebih mengkaji politik identitas yang direpresentasikan melalui etnis. Isu mengenai etnisitas ini memang sudah menjadi agenda yang terus terjadi berulang-ulang disetiap momentum pergantian kekuasaan. Politik etnis mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir khususnya dalam perburuan kekuasaan eksekutif (pilkada). Penggunaan identitas sebagai komoditas dan sumber daya politik menjadi langkah strategis bagi para calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Identitas etnis sebagai identitas diri dalam seseorang yang direpresentasikan dalam proses politik merupakan fenomena politik di dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur. Hal ini dimungkinkan agar orang lain memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui asal-usul itulah setiap orang dapat mendefinisikan tentang “bagaimana saya berbeda dengan orang lain” dan dari sinilah dapat diketahui “apakah kita sama dengan orang lain.” Dengan demikian keberadaan etnis maupun ras memberikan makna tentang keberadaan kita sebagai manusia yang nyata karena memiliki dan berada dalam konteks sejarah dan konteks sosial (etnis).

Goncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah kita rasakan pengaruhnya. Bahkan peristiwa ini sudah menjadi agenda rutin tiap pilkada

sebagai strategi ampuh untuk kemenangan dalam usaha perebutan kekuasaan. Celaknya negara absen dalam melindungi warganya dan konflik pun tak bisa terelakkan. Seperti adanya konflik-konflik horisontal di berbagai daerah. Realitas empiris dari gerakan politik etnisitas menemukan relevansinya di beberapa daerah, misalnya politik etnisitas yang mengandalkan mobilisasi massa dengan tujuan akhir adalah perampasan kekuasaan muncul dalam mengiringi politik desentralisasi dengan lahirnya konsepsi putra daerah.

C. Kerangka Pikir

Pilkada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak hanya diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah pilkada tersebut telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Apabila pilkada langsung hanya digunakan sebagai ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme “*votting*” dari suara pemilih maka dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas namun tidak memiliki kompetensi dalam mengelola daerah.

Kehadiran dari politik identitas yang mengedepankan sentimen etnis dalam pilkada merupakan aliran-aliran politik bersifat ekstrim kedaerahan. Sentimen etnis semacam ini memang hanya akan menjadi bentuk tirani yang *chauvinistik* dimana unsur keberagaman ditiadakan. Oleh karena itu kesadaran bahwa republik ini harus dibangun di atas dasar dan pondasi kebhinekaan hendaknya selalu

menjadi pijakan. Tetapi nampaknya perkembangan politik dewasa ini secara tidak langsung menempatkan politik identitas menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilihan umum.

Pada penelitian ini variabel etnis dijadikan sebagai salah satu unsur yang diteliti. Hal ini dilandasi oleh latar belakang dari munculnya wacana atau pun isu-isu sentimen etnis, dimana ada semacam penggunaan simbol-simbol yang merepresentasikan identitas kandidat. Identitas tersebut sengaja dimunculkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa identitas tersebut mewakili atas kelompok dirinya yang kemudian mengidentifikasi rasa kepemilikan terhadap kesamaan-kesamaan (*sense of belonging*) dan membatasi sesuatu yang di luar kesamaan tersebut sebagai pembedaan (*sense of otherness*).

Dengan menggunakan perspektif di atas maka kerangka pikir penelitian ini menjelaskan proses manifestasi politik etnis. Etnis yang direpresentasikan sebagai identitas politik seorang kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati. Representasi itu lahir dari adanya penggunaan simbol-simbol untuk memberikan penandaan terhadap dirinya. Dimana identitas yang muncul secara simbolik tersebut diharapkan dapat mewakili dirinya sebagai bagian dari suatu kolektivitas atau kelompok dalam masyarakat. Sehingga kemudian mempengaruhi perasaan, persepsi, dan cara berpikir masyarakat berdasarkan rasa saling memiliki sesuai budaya (etnis) yang dianutnya. Identitas tersebut tercermin secara simbolik berdasarkan faktor genetik (garis keturunan), kesamaan bahasa, kesamaan asal daerah, dan faktor kesamaan latar belakang sejarah.

Identitas itu diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan dengan orang lain dan pada saat yang bersamaan juga identitas diformulasikan oleh keberbedaan (*otherness*) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*). Rasa kepemilikan terhadap kesamaan-kesamaan tersebut secara kolektifitas mewujudkan kelompok “kita” (*in grup*) sedangkan sesuatu yang di luar persamaan sebagai kategori pembeda itu membentuk konsep “mereka” (*out grup*). Dimana kesemua unsur ini dapat menentukan ke arah mana posisi subyek (konstituen) pada pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012. Karena pada dasarnya unsur-unsur tersebut merupakan suatu hal yang memang sudah ada sebelum pilkada berlangsung. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana politik etnis dalam mengarahkan pilihan politik seseorang.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

